



From Interest to Apathy: Media Access Gaps and Political Trust in Relation to Political Participation

Dari Minat ke Apatitis: Kesenjangan Akses Media dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik

Olivia Devita Permatasari^{1*}, Roni Jayawinangun², Sardi Duryatmo³

^{1,2,3} Department of Communication Science, Universitas Pakuan, Indonesia

OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)

ISSN 2302-6790 (print)

Edited by:
Didik Hariyanto

*Correspondence:
olivejournal@gmail.com

Citation:
Olivia Devita Permatasari, Roni Jayawinangun, dan Sardi Duryatmo. (2026). Dari Minat ke Apatitis: Kesenjangan Akses Media dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik. 14(2)

Doi:10.21070/kanal.v14i2.2046

Abstract

This study examines the role of media access inequality and political trust in shaping political participation in Bogor City and Regency following the 2024 Regional Election (Pilkada). The study aims to: (1) measure the levels of media access inequality, political trust, and political participation; (2) analyze the effect of media access inequality on political trust; (3) analyze the effect of political trust on online and offline political participation; and (4) examine the mediating role of political trust between media access inequality and political participation. A quantitative cross-sectional explanatory survey was conducted with 404 respondents through purposive sampling from registered voters of the 2024 Pilkada in Bogor City and Regency. Data were analyzed using linear regression, multiple linear regression, and mediation analysis (PROCESS Hayes Model 4, 4,000 bootstrap resamples). Media access inequality significantly affects political trust ($\beta = 0.389$; $p < 0.001$) and political participation ($\beta = 0.171$; $p < 0.05$), while political trust shows a stronger effect on political participation ($\beta = 0.212$; $p < 0.001$). Political trust partially mediates the relationship between media access inequality and political participation (indirect effect = 0.060; Boot CI 95% [0.024; 0.104]), indicating media access influences participation directly through information provision and indirectly via political trust formation. This study integrates the Knowledge Gap Hypothesis, Political Trust Theory, and Political Efficacy Theory into a single empirical mediation model in the Indonesian local electoral context. The practical implications of this study emphasize the need for policies aimed at equalizing media access and strengthening public trust through transparent political communication, as well as community-based digital media literacy programs.

Keywords: digital political communication, media access inequality, political participation, political trust

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran kesenjangan akses media dan kepercayaan politik dalam membentuk partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor pasca Pilkada 2024. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur tingkat kesenjangan akses media, kepercayaan politik, dan partisipasi politik masyarakat; (2) menganalisis pengaruh kesenjangan akses media terhadap kepercayaan politik; (3) menganalisis pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik daring dan luring; serta (4) menguji peran kepercayaan politik sebagai variabel mediator dalam hubungan antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik. Penelitian

menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei cross-sectional terhadap 404 responden yang dipilih melalui purposive sampling dari pemilih terdaftar dalam DPT Pilkada 2024 di Kota dan Kabupaten Bogor. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana, regresi berganda, dan uji mediasi (PROCESS Hayes Model 4, 4.000 *bootstrap resamples*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan akses media berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan politik ($\beta = 0,389$; $p < 0,001$); (2) kepercayaan politik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik ($\beta = 0,212$; $p < 0,001$); (3) kesenjangan akses media berpengaruh langsung terhadap partisipasi politik ($\beta = 0,171$; $p < 0,05$); dan (4) kepercayaan politik memediasi secara parsial hubungan antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik (efek tidak langsung = 0,060; 95% CI [0,024; 0,104]). Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan Knowledge Gap Hypothesis, Political Trust Theory, dan Political Efficacy Theory dalam satu model mediasi empiris pada konteks pemilu lokal Indonesia. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pemerataan akses media dan penguatan kepercayaan publik melalui komunikasi politik yang transparan serta program literasi media digital berbasis komunitas.

Kata Kunci: kepercayaan politik, kesenjangan akses media, komunikasi politik digital, partisipasi politik

PENDAHULUAN

Partisipasi politik warga merupakan inti dari praktik demokrasi yang sehat. Dalam sistem demokrasi representatif, keterlibatan warga baik melalui pemungutan suara, kampanye, diskusi publik, maupun aktivisme digital menjadi mekanisme utama yang melegitimasi kekuasaan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan (Halder & Campbell-Phillips, 2020; Willeck & Mendelberg, 2022). Kajian lintas negara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan psikologis yang saling berkaitan, di antaranya akses terhadap informasi politik, kepercayaan terhadap institusi demokrasi, serta keyakinan individu atas efektivitas tindakan politiknya (Oser et al., 2022; Quaranta et al., 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital dan media sosial, telah mengubah secara mendasar cara warga mengakses, memproses, dan merespons informasi politik, menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi partisipasi demokratis (Vaccari & Valeriani, 2018; Widodo & Kristiyono, 2025).

Paradoks sentral dalam era demokrasi digital adalah meluasnya akses informasi politik yang tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas partisipasi. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik bersifat positif namun moderat, kontekstual, dan sangat bergantung pada faktor psikologis seperti minat politik awal, *political efficacy*, dan kepercayaan terhadap institusi (Boulianne, 2015; Kurniawan et al., 2024). Penelitian longitudinal di 18 negara demokrasi mapan menemukan bahwa peningkatan pilihan media dan akses internet tidak selalu diikuti peningkatan pengetahuan politik yang merata (Haugsgjerd et al., 2021). Ketimpangan dalam kapasitas mengakses dan memproses informasi politik yang disebut sebagai kesenjangan akses media (*media access inequality*) berpotensi menciptakan ketimpangan pengetahuan yang pada akhirnya memengaruhi intensitas dan kualitas partisipasi (Haugsgjerd et al., 2021; Schäfer & Schemer, 2024). Di sisi lain, media sosial cenderung memperkuat perilaku politik yang telah ada daripada mentransformasikannya, dan aktivisme daring tidak selalu berujung pada tindakan politik nyata secara luring (Kurniawan et al., 2024; Wahyuningroem et al., 2024).

Kesenjangan akses media (*media access inequality*) didefinisikan sebagai kondisi ketimpangan yang dialami individu atau kelompok dalam mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan media sebagai sumber informasi politik secara optimal (Haugsgjerd et al., 2021). Konsep ini tidak hanya mencakup ketersediaan infrastruktur internet, tetapi juga dimensi kognitif, motivasional, dan kultural penggunaan media. Dalam penelitian ini, kesenjangan akses media dioperasionalkan melalui tiga indikator: (1) akses terhadap media konvensional (televisi, radio, surat kabar); (2) akses dan intensitas penggunaan media digital (internet, platform media sosial: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan X); dan (3) akses terhadap informasi politik resmi dari KPU, pemerintah daerah, dan media arus utama. Operasionalisasi ini didasarkan pada kerangka *Knowledge Gap Hypothesis* (Haugsgjerd et al., 2021). Laporan Bank

Dunia (2022) menegaskan masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses internet dan literasi digital antara wilayah perkotaan dan nonperkotaan di Indonesia, yang berimplikasi langsung pada distribusi pengetahuan dan partisipasi politik antarwilayah.

Faktor psikologis yang turut berperan penting adalah kepercayaan politik (*political trust*). Dalam kerangka *Political Trust Theory*, kepercayaan politik didefinisikan sebagai evaluasi kognitif dan afektif warga terhadap integritas, responsivitas, dan legitimasi institusi politik serta proses demokrasi yang berlangsung (Quaranta et al., 2022). Dalam penelitian ini, kepercayaan politik dioperasionalkan melalui tiga dimensi: (1) kepercayaan terhadap institusi politik; (2) kepercayaan terhadap aktor dan kandidat politik; serta (3) kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi, yakni keyakinan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara transparan, bebas, dan adil. Warga dengan kepercayaan politik yang tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi, baik secara daring maupun luring (Ariel et al., 2024). Selain itu, Ariel et al. (2024) membedakan pengaruhnya kepercayaan terhadap sistem politik lebih kuat memengaruhi partisipasi luring, sementara kepercayaan terhadap aktor politik lebih berpengaruh pada partisipasi daring. Ketika kesenjangan akses media menyebabkan warga terpapar informasi yang bias atau tidak terverifikasi, kepercayaan politik dapat terkikis sehingga mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam proses elektoral (Guseva, 2024). Dengan demikian, kesenjangan akses media, kepercayaan politik, dan partisipasi politik membentuk rantai kausal yang saling berkaitan.

Selain kepercayaan politik, partisipasi juga dipengaruhi oleh *political efficacy*, yakni keyakinan individu atas kapasitas dirinya dalam proses politik. *Political Efficacy Theory* membedakan dua dimensi: *internal political efficacy*, yaitu keyakinan individu atas kemampuannya memahami isu politik dan berpartisipasi secara bermakna; serta *external political efficacy*, yaitu keyakinan bahwa sistem dan aktor politik responsif terhadap aspirasi warga (Oser et al., 2022). Meta-analisis *multilevel* yang mencakup 48 studi dengan 184 efek dari 51.860 responden di 28 negara membuktikan bahwa *political efficacy* memiliki hubungan positif yang kuat dengan partisipasi politik, baik daring maupun luring, tanpa perbedaan signifikan dalam kekuatan asosiasi keduanya (Oser et al., 2022). Dalam konteks kesenjangan akses media, tingginya eksposur informasi tidak selalu meningkatkan *political efficacy* bila individu tidak memiliki kemampuan memproses informasi secara kritis yang menjelaskan mengapa konsumsi konten politik yang tinggi tidak selalu menghasilkan partisipasi aktual (Schäfer & Schemer, 2024).

Partisipasi politik (*political participation*) didefinisikan sebagai segala bentuk keterlibatan warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik (Liu et al., 2021; Willeck & Mendelberg, 2022). Dalam penelitian ini, partisipasi politik dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi: (1) partisipasi elektoral, meliputi kehadiran langsung dalam pemungutan suara Pilkada 2024 dan penggunaan hak pilih sebagai bentuk keterlibatan paling mendasar dalam proses demokrasi; (2) partisipasi politik luring (*offline*), meliputi keterlibatan dalam kampanye, diskusi politik tatap muka, dan

kegiatan komunitas politik; serta (3) partisipasi politik daring (*online*), meliputi berbagi informasi politik di media sosial, mengikuti akun kandidat atau institusi politik, memberikan komentar atau pendapat politik secara digital, dan berpartisipasi dalam petisi atau gerakan daring. Perbedaan tiga dimensi ini penting karena partisipasi elektoral mencerminkan keterlibatan institusional yang paling terukur, sementara keterlibatan daring tidak selalu berkorelasi dengan partisipasi luring yang bermakna, dan keduanya dapat terjadi secara independen satu sama lain (Ariel et al., 2024; Wahyuningroem et al., 2024).

Di tingkat nasional, tren partisipasi dalam Pilkada serentak di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif dari sekitar 69% pada Pilkada 2015, meningkat menjadi 73,97% pada 2017, kemudian 73,24% pada 2018, dan 76,09% pada 2020, namun kembali turun menjadi sekitar 68,1% pada Pilkada Serentak 2024 berada di bawah rata-rata Pilkada sebelumnya (Anggraeni et al., 2025; KPU, 2020; Setiawan & Djafar, 2023). Penurunan ini tidak terlepas dari kejenuhan politik masyarakat akibat padatnya siklus pemilu serta keterbatasan pilihan kandidat yang belum sepenuhnya merepresentasikan aspirasi publik (Akbar, 2023). Fenomena rendahnya partisipasi tidak sekadar dipahami sebagai absensi pemilih, melainkan sebagai ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik (Guseva, 2024). Dalam ekosistem media digital yang semakin berkembang, dari total 204,8 juta pemilih terdaftar, sekitar 56,45% adalah Generasi Z dan Milenial (Heryanto, 2024) menempatkan Indonesia dalam lanskap komunikasi politik yang semakin kompleks di mana media digital telah menjadi ruang utama pembentukan sikap dan keterlibatan politik atau *networked political communication* (Widodo & Kristiyono, 2025).

Kota dan Kabupaten Bogor menjadi konteks yang strategis untuk mengkaji fenomena ini. Kota Bogor mencatat partisipasi Pilkada sebesar 75% pada 2020, namun turun signifikan menjadi 63% pada Pilkada 2024, jauh di bawah target nasional 77,5% (Anggraeni et al., 2025; Tempo, 2024). Penurunan lebih dramatis terjadi di Kabupaten Bogor, dengan partisipasi Pilkada 2024 hanya 54,55%, sementara jumlah pemilih golput mencapai sekitar 1,6 juta orang bahkan melebihi perolehan suara pasangan calon pemenang (Saputra, 2024). Paradoksnya, media sosial menjadi sumber informasi politik dominan di kedua wilayah namun partisipasi aktual justru menurun (Anggraeni et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan akses media dan kepercayaan politik bukan sekadar ketersediaan informasi yang menjadi penentu perbedaan partisipasi. Dalam konteks komunikasi politik lokal Bogor, koordinasi personal dan komunikasi digital berbasis kepercayaan juga terbukti membentuk *trust-based political communication* yang memperkuat tata kelola lokal (Sugiarto & Jayawinangun, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan empiris bagi penelitian ini. Jayawinangun dan Valdiani (2020) membuktikan pengaruh media sosial terhadap tipologi partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor, dengan pengetahuan politik sebagai mediator. Jayawinangun dan Nugroho (2025) menemukan pengaruh media digital, kesadaran, dan

pengetahuan politik terhadap partisipasi pemilih muda. Anggraeni, Jayawinangun et al. (2026) menemukan komunikasi politik aktor di media sosial berpengaruh terhadap minat dan partisipasi masyarakat Bogor, namun minat tidak terbukti sebagai mediator. Arrazak dan Adnan (2025) menunjukkan pengaruh media sosial dan kepercayaan politik terhadap partisipasi pemilih muda di Padang. Kurniawan (2024) menemukan media sosial memperkuat perilaku politik yang ada, bukan mentransformasikannya. Wahyuningroem (2024) mengidentifikasi jarak antara keterlibatan digital dan partisipasi luring pemuda Indonesia. Adnan dan Mona (2024) menemukan konsistensi konten tidak selalu meningkatkan interaktivitas audiens. Abdullah et al. (2024) menyimpulkan politik identitas mendorong perilaku kontra-produktif.

Generasi Z di media sosial. Ramadhani (2025) menunjukkan media sosial sebagai pemantik partisipasi Generasi Z dalam Pilkada Jakarta. Reza, Duryatmo, dan Suandi (2024) menemukan adaptasi penggunaan media berbeda antarkelompok generasi. Boulianne (2022) menemukan bahwa internal *political efficacy* memiliki hubungan positif yang lebih kuat dengan partisipasi digital dibandingkan eksternal *political efficacy*, memperkuat argumen bahwa kapasitas individu lebih menentukan keterlibatan politik daripada persepsi responsivitas sistem. Boulianne (2023) membuktikan bahwa ketimpangan partisipasi daring dan luring tetap persisten di berbagai negara demokrasi, di mana pendidikan bukan sekadar akses internet menjadi prediktor utama keterlibatan warga, mengindikasikan bahwa akses media saja tidak cukup tanpa kapasitas untuk memanfaatkannya. Bulya dan Izzati (2024) menemukan bahwa rendahnya literasi digital di Indonesia menjadikan masyarakat rentan terhadap hoaks politik yang mengikis kepercayaan dan menghambat partisipasi demokratis yang berkualitas.

Zetra et al. (2022) membuktikan kesadaran politik memediasi hubungan pengetahuan dan partisipasi. Hassan et al. (2022) menemukan korelasi positif antara literasi media dan kualitas partisipasi pemuda. Ariel et al. (2024) menemukan bahwa kepercayaan terhadap sistem dan kepercayaan terhadap aktor memiliki peran yang berbeda dalam partisipasi daring maupun luring. Haugsgjerd et al. (2021) membuktikan pilihan media yang lebih banyak tidak menjamin peningkatan pengetahuan yang merata. Schäfer dan Schemer (2024) menemukan paparan berita memediasi partisipasi melalui pengetahuan aktual dan persepsi pengetahuan. Oser dan Boulianne (2022) membuktikan *political efficacy* berhubungan positif kuat dengan partisipasi daring dan luring. Quaranta (2022) mengkaji hubungan kepercayaan, kepuasan, dan keterlibatan politik pemuda. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara akses media, kepercayaan politik, dan partisipasi politik bersifat kompleks, nonlinear, dan dimediasi oleh faktor kognitif, psikologis, serta kontekstual.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa celah yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, sebagian besar studi terdahulu mengkaji variabel media, kepercayaan, dan

partisipasi secara parsial atau bivariat tanpa menguji mekanisme mediasi dalam satu model struktural yang komprehensif. Akibatnya, pertanyaan tentang apakah dan bagaimana akses media memengaruhi partisipasi melalui pembentukan kepercayaan belum terjawab dengan memadai. Kedua, mayoritas studi yang ada mengukur partisipasi politik sebagai konstruk tunggal, padahal dalam era demokrasi digital, partisipasi daring dan luring memiliki pola, determinan, dan implikasi yang berbeda kajian yang mengukur keduanya secara simultan masih sangat terbatas dalam konteks Indonesia. Ketiga, penelitian yang secara spesifik menguji peran kesenjangan akses media bukan sekadar penggunaan media sebagai variabel prediktor kepercayaan politik dan partisipasi dalam konteks Pilkada lokal di wilayah urban-suburban Indonesia belum banyak dilakukan. Keempat, penggunaan metode *bootstrapping* dalam uji mediasi untuk konteks pemilu lokal Indonesia masih jarang, sehingga estimasi efek tidak langsung yang akurat dan robust belum banyak tersedia dalam literatur.

Berdasarkan celah penelitian tersebut dan berlandaskan pada *Knowledge Gap Hypothesis* (Haugsgjerd et al., 2021), *Political Trust Theory* (Quaranta et al., 2022), dan *Political Efficacy Theory* (Oser et al., 2022), penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur tingkat kesenjangan akses media, kepercayaan politik, dan partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor pasca Pilkada 2024; (2) menganalisis pengaruh kesenjangan akses media terhadap kepercayaan politik; (3) menganalisis pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik daring dan luring; serta (4) menguji peran kepercayaan politik sebagai variabel mediator antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik.

METODE

Bagian ini menguraikan pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, lokasi dan populasi, variabel dan instrumen, hipotesis, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hipotesis tentang pengaruh dan hubungan antarvariabel secara terukur. Desain *cross-sectional* diterapkan karena pengumpulan data dilakukan pada satu titik waktu tertentu tanpa pengamatan berulang dalam jangka panjang. Sifat eksplanatori pada desain ini berarti penelitian tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, melainkan secara aktif menguji hubungan kausal antara kesenjangan akses media sebagai variabel bebas (X), kepercayaan politik sebagai variabel mediator (Z), dan partisipasi politik sebagai variabel terikat (Y).

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih secara *purposive* karena memiliki karakteristik sosial-demografis yang berbeda namun berada dalam satu ekosistem politik yang sama pada Pilkada Serentak 2024. Kota Bogor merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan aksesibilitas digital

yang relatif lebih tinggi, sementara Kabupaten Bogor mencakup wilayah yang jauh lebih luas dan heterogen meliputi kawasan suburban hingga pedesaan yang masih menghadapi ketimpangan infrastruktur digital. Kontras karakteristik ini menjadikan kedua wilayah relevan untuk menguji apakah kesenjangan akses media berdampak berbeda terhadap kepercayaan dan partisipasi politik di dua konteks yang berbeda dalam satu daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Jawa Barat menempati posisi keempat secara nasional dan kedua di Pulau Jawa, menjadikan Bogor sebagai wilayah yang memiliki signifikansi politis tinggi untuk diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan total 4.741.329 pemilih terdaftar terdiri atas 815.249 pemilih di Kota Bogor dan 3.926.080 pemilih di Kabupaten Bogor. Satuan subjek penelitian adalah individu warga negara berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang terdaftar sebagai pemilih aktif dalam DPT Pilkada 2024 di kedua wilayah tersebut. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* 5%, sehingga diperoleh sampel minimal sebesar 400 responden. Dalam pelaksanaannya, sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 404 responden. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik non-probabilitas yang memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2021). Kuesioner disebarkan secara daring melalui *Google Form* maupun secara luring kepada responden yang ditemui langsung di lapangan, dengan tetap memastikan setiap responden memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi responden: (1) terdaftar dalam DPT Pilkada 2024 di Kota atau Kabupaten Bogor; (2) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah; dan (3) berdomisili di Kota atau Kabupaten Bogor pada saat pengambilan data.

Penelitian ini mengukur tiga variabel utama melalui kuesioner terstruktur. Variabel bebas (X) adalah kesenjangan akses media, diukur melalui 13 indikator yang mencakup: (1) akses terhadap media konvensional (televisi, radio, surat kabar); (2) akses dan intensitas penggunaan media digital (internet, *platform* media sosial: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan X); dan (3) akses terhadap informasi politik resmi dari KPU, pemerintah daerah, dan media arus utama berlandaskan kerangka *Knowledge Gap Hypothesis* (Haugsgjerd et al., 2021). Variabel mediator (Z) adalah kepercayaan politik, diukur melalui 17 indikator yang mencakup tiga dimensi: (1) kepercayaan terhadap institusi politik (KPU, DPR, pemerintah daerah, DPRD, kepolisian); (2) kepercayaan terhadap aktor dan kandidat politik; serta (3) kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi mengacu pada *Political Trust Theory* (Elishar, M et al., 2020; Quaranta et al., 2022). Variabel terikat (Y) adalah partisipasi politik, diukur melalui 20 indikator yang mencakup tiga dimensi: (1) partisipasi elektoral, meliputi kehadiran dan keterlibatan aktif dalam pemungutan suara Pilkada 2024 serta pengalaman menggunakan hak pilih secara langsung; (2) partisipasi daring (berbagi konten politik, mengikuti akun resmi kandidat/partai, berpartisipasi dalam diskusi politik digital) dan (3) partisipasi luring (menghadiri

kampanye, mendiskusikan isu politik secara langsung, terlibat dalam kegiatan komunitas politik) mengacu pada Oser dan Boulianne (2022) serta Vaccari dan Valeriani (2018). Uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* (item valid bila korelasi positif dan signifikan, $p < 0,05$). Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* (reliabel bila $\alpha \geq 0,70$) (Handayani, 2024; Subhaktiyasa, 2021). Hasil uji disajikan pada Tabel 1. Seluruh variabel memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha*: kesenjangan akses media ($\alpha = 0,775$), kepercayaan politik ($\alpha = 0,865$), dan partisipasi politik ($\alpha = 0,849$).

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Indikator	Rata-rata Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kesenjangan Akses Media (X)	13	0,55	0,098	Valid
Kepercayaan Politik (Z)	17	0,57	0,098	Valid
Partisipasi Politik (Y)	20	0,60	0,098	Valid

Sumber: Data Primer, 2026

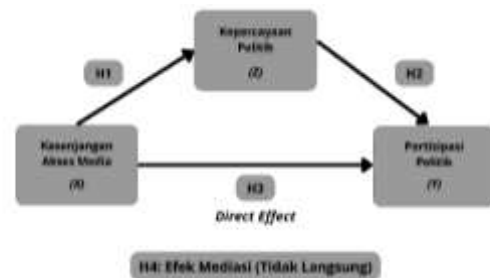
Uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan reliabilitas yang baik (Subhaktiyasa, 2021). Hasil menunjukkan seluruh variabel reliabel: kesenjangan akses media ($\alpha = 0,775$), kepercayaan politik ($\alpha = 0,865$), dan partisipasi politik ($\alpha = 0,849$). Nilai alpha tertinggi pada kepercayaan politik mencerminkan konsistensi internal yang sangat kuat, sementara dua variabel lainnya berada pada kategori reliabilitas baik.

Hipotesis mayor penelitian ini adalah: kesenjangan akses media berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran mediasi kepercayaan politik. Hipotesis mayor ini dijabarkan ke dalam empat jalur pengujian: (H₁) kesenjangan akses media berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan politik; (H₂) kepercayaan politik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik; (H₃) kesenjangan akses media berpengaruh langsung dan signifikan terhadap partisipasi politik; serta (H₄) kepercayaan politik memediasi secara parsial hubungan antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik.

A



B



Gambar 1. Model Mediasi Penelitian

Sumber: Data Primer, 2026

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan SPSS versi 26. Pertama, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik demografi responden dan distribusi skor tiap variabel (*mean*, *standard deviation*, *minimum*, *maximum*). Kedua, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas residual (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor*, $VIF < 10$), dan uji heteroskedastisitas (Glejser) untuk memastikan kelayakan model regresi. Ketiga, analisis regresi linear sederhana untuk menguji H₁, H₂, dan H₃ (pengaruh langsung antarvariabel), serta regresi berganda untuk menguji model secara simultan. Keempat, uji mediasi menggunakan *PROCESS macro* Hayes Model 4 dengan metode *bootstrapping* 4.000 *resamples*. Metode ini dipilih karena menghasilkan estimasi interval kepercayaan efek tidak langsung yang lebih akurat tanpa mengasumsikan distribusi normal sampel (Hayes, 2024). Kepercayaan politik dinyatakan sebagai mediator parsial apabila: (a) efek tidak langsung ($a \times b$) signifikan, ditunjukkan oleh interval kepercayaan *bootstrap* 95% yang tidak melewati nol; dan (b) pengaruh langsung X terhadap Y (jalur c') tetap signifikan setelah variabel Z dimasukkan ke dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian melibatkan 404 responden yang tersebar di Kota Bogor (47,8%; $n = 192$) dan Kabupaten Bogor (52,2%; $n = 210$). Karakteristik lengkap disajikan pada Tabel 2. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 21–30 tahun (49,5%), mencerminkan dominasi pemilih muda generasi digital yang terbiasa mengonsumsi informasi politik melalui *platform* daring. Dominasi kelompok usia produktif ini relevan dengan variabel penelitian, mengingat literatur secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan media digital lebih intensif pada kelompok usia muda namun tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi aktual (Wahyuningroem et al., 2024). Komposisi jenis kelamin relatif seimbang (perempuan 54,5%; laki-laki 45,5%), yang memungkinkan generalisasi temuan lintas gender. Mayoritas responden berpendidikan menengah (SMP/SMA, 54,7%), diikuti sarjana (25,9%), dengan sebaran pendapatan terbesar pada kelompok Rp3,5–15 juta per bulan (42,8%), menempatkan responden pada segmen kelas menengah urban-suburban. Distribusi domisili yang hampir seimbang antara Kota dan Kabupaten menjadikan sampel ini representatif untuk mengkaji perbedaan pola akses media dan partisipasi politik di dua karakteristik wilayah yang berbeda dalam satu daerah pemilihan. Profil pendidikan dan pendapatan menunjukkan

bahwa mayoritas responden memiliki kapasitas kognitif dan akses ekonomi yang memadai untuk menggunakan media digital, sehingga variasi dalam kesenjangan akses media yang ditemukan lebih mencerminkan perbedaan kualitas penggunaan dan kemampuan memproses informasi politik bukan sekadar keterbatasan kepemilikan perangkat.

Tabel 2. Karakteristik Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (N)	Persentase (%)
Usia	< 21 tahun	32	8.0
	21-30 tahun	199	49.5
	31-40 tahun	83	20.6
	41-50 tahun	63	15.7
	51-60 tahun	20	5.0
	> 60 tahun	5	1.2
Jenis Kelamin	Perempuan	219	54.5
	Laki-Laki	183	45.5
Pendidikan Terakhir	Sekolah Dasar (SD)	13	3.2
	Pendidikan Menengah (SMP/SMA)	220	54.7
	Diploma	55	13.7
	Sarjana (S1)	104	25.9
	Pascasarjana (S2/S3)	10	2.5
Pendapatan Bulanan	< Rp550.000	56	13.9
	Rp550.000-1,2 juta	62	15.4
	Rp1,2-3,5 juta	80	19.9
	Rp3,5 juta-15 juta	172	42.8
	>15 juta	32	8.0
Status Pernikahan	Belum Menikah	178	44.3
	Menikah	224	55.7
Domisili	Kota Bogor	192	47.8
	Kabupaten Bogor	210	52.2

Tabel 3 menyajikan gambaran distribusi ketiga variabel utama. Kesenjangan akses media (X) memiliki nilai rata-rata 40,34 dari skor maksimal teoritis 65 (SD = 10,98), yang menempatkannya pada kategori moderat dengan deviasi standar yang cukup besar mengindikasikan bahwa ketimpangan akses media antar-responden masih nyata meskipun rata-rata berada di tengah. Tingginya variabilitas ini konsisten dengan prediksi *Knowledge Gap Hypothesis* bahwa peningkatan pilihan media tidak mendistribusikan akses secara merata, melainkan justru memperlebar jurang antara kelompok yang terampil dan kurang terampil secara digital (Haugsgjerd et al., 2021). Kepercayaan politik (Z) memiliki rata-rata 39,00 dari skor maksimal teoritis 85 (SD = 8,64), menempatkannya pada kategori sedang-bawah yang mencerminkan ambivalensi masyarakat terhadap institusi demokrasi sebuah fenomena yang tidak hanya khas

Indonesia tetapi juga ditemukan di banyak demokrasi berkembang pasca krisis kepercayaan publik (Guseva, 2024; Quaranta et al., 2022). Partisipasi politik (Y) memiliki rata-rata 12,89 dari skor maksimal teoritis 100 (SD = 8,02), yang terbilang rendah dan mempertegas paradoks demokrasi digital: tingginya paparan informasi tidak berbanding lurus dengan keterlibatan aktual (Vaccari & Valeriani, 2018). Temuan ini sejalan dengan hasil Anggraeni et al. (2025) yang menemukan bahwa meskipun media sosial mendominasi sebagai sumber informasi politik di Bogor, keterlibatan aktual dalam Pilkada 2024 justru menurun signifikan dibandingkan 2020.

Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah kesenjangan antara partisipasi daring (Mean = 6,11; SD = 4,35) dan partisipasi luring (Mean = 3,71; SD = 4,28). Partisipasi daring yang lebih tinggi menunjukkan bahwa warga lebih nyaman terlibat secara digital berbagi konten, mengikuti akun kandidat, atau berkomentar di media sosial dibandingkan hadir secara fisik dalam kampanye atau terlibat aktif dalam komunitas politik. Pola ini mencerminkan fenomena yang oleh Wahyuningroem et al. (2024) disebut sebagai jarak antara keterlibatan digital dan partisipasi substantif: aktivisme daring yang tidak selalu berujung pada mobilisasi nyata. Nilai SD yang hampir setara pada kedua dimensi partisipasi juga mengindikasikan heterogenitas yang tinggi dalam sampel, memperkuat perlunya analisis pengaruh variabel prediktor secara lebih mendalam.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	SD
Kesenjangan Akses Media (TOTAL_X)	404	8,00	69,00	40,34	10,98
Kepercayaan Politik (TOTAL_Z)	404	17,00	80,00	39,00	8,64
Partisipasi Politik (TOTAL_Y)	404	1,00	52,00	12,89	8,02
Partisipasi Daring	404	0	24	6,11	4,35
Partisipasi Luring	404	0	24	3,71	4,28

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi linear dan uji mediasi. Tabel 4 menyajikan hasil uji pengaruh langsung (H₁, H₂, H₃), sedangkan Tabel 5 menyajikan hasil uji mediasi (H₄). Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (VIF < 10), dan uji heteroskedastisitas (Glejser) seluruh asumsi terpenuhi, sehingga model dinyatakan layak untuk diinterpretasikan. Model regresi berganda secara keseluruhan signifikan (F = 22,770; p < 0,001), dengan koefisien determinasi R² = 0,102, yang berarti 10,2% variasi partisipasi politik dapat dijelaskan

oleh kesenjangan akses media dan kepercayaan politik secara simultan. Nilai R^2 yang moderat ini lazim dan dapat diterima dalam penelitian perilaku sosial-politik studi lintas-negara oleh Oser dan Boulianne (2022) menunjukkan bahwa model dengan dua hingga tiga prediktor sosial-psikologis umumnya menghasilkan R^2 antara 0,08–0,15, mengingat partisipasi politik merupakan konstruk multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, psikologis, situasional, dan budaya yang tidak semuanya dapat dirangkum dalam satu model. Nilai F yang tinggi (22,770) dengan $p < 0,001$ mengonfirmasi bahwa hubungan antarvariabel bukan terjadi secara kebetulan, dan kontribusi model bermakna secara statistik. Justru di sinilah letak kontribusi model mediasi bukan untuk menjelaskan seluruh varians partisipasi, melainkan untuk mengungkap dengan presisi mekanisme jalur yang menghubungkan akses media dengan partisipasi melalui pembentukan kepercayaan politik.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear – Pengaruh Langsung Antarvariabel

Jalur/Hipotesis	β	B	Beta	Sig
H ₁ : Kesenjangan Akses Media → Kepercayaan Politik	0,389	0,307	8,478	0,000***
H ₂ : Kepercayaan Politik → Partisipasi Politik	0,212	0,197	4,118	0,000***
H ₃ : Kesenjangan Akses Media → Partisipasi Politik (langsung, c')	0,171	0,125	3,320	0,001**

Catatan: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$

Tabel 5. Hasil Uji Mediasi

Jalur Pengaruh	Koefisien	BootLL CI	BootUL CI	Keterangan
Kesenjangan Akses Media → Kepercayaan Politik	0,3065	0,2355	0,3776	Signifikan
Kepercayaan Politik → Partisipasi Politik	0,1965	0,1027	0,2903	Signifikan
Kesenjangan Akses Media → Partisipasi Politik (langsung)	0,1247	0,0508	0,1985	Signifikan
Kesenjangan Akses Media → Kepercayaan Politik → Partisipasi Politik (tidak langsung)	0,0602	0,0244	0,1036	Mediasi Parsial

Bagian ini membahas interpretasi dari keempat temuan utama penelitian secara berurutan, mencakup pengaruh kesenjangan akses media terhadap kepercayaan politik, pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik, pengaruh langsung kesenjangan akses media terhadap partisipasi politik, serta peran mediasi kepercayaan politik.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesenjangan akses media berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan politik ($\beta = 0,389$; $p < 0,001$), sehingga H₁ diterima. Nilai koefisien ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas dan keluasan akses media yang dimiliki individu mencakup ketersediaan akses internet yang stabil, keberagaman sumber informasi, intensitas konsumsi konten politik, kemudahan akses informasi resmi pemilu, serta kemampuan verifikasi informasi semakin tinggi pula tingkat kepercayaan politiknya. Sebaliknya, individu dengan akses media yang terbatas berisiko mengalami *information deprivation*: kondisi di mana minimnya paparan terhadap informasi yang akurat dan beragam mendorong pembentukan persepsi negatif terhadap institusi politik, terutama ketika narasi yang beredar di lingkungan mereka didominasi oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Temuan ini memperkuat *Knowledge Gap Hypothesis* bahwa peningkatan pilihan media tidak mendistribusikan pengetahuan secara merata kelompok dengan modal digital lebih tinggi justru semakin diuntungkan, sementara kelompok dengan akses terbatas semakin tertinggal dalam pemahaman dan kepercayaan politik (Haugsgjerd et al., 2021). Ketika distribusi informasi politik tidak merata, kelompok dengan akses terbatas lebih rentan terpapar konten yang menyesatkan, hoaks politik, dan narasi disinformasi yang memperkuat sikap skeptis dan sinisme terhadap institusi (Rapeli, 2025; Schäfer & Scherer, 2024). Nilai $\beta = 0,389$ yang diperoleh terbilang relatif tinggi dibandingkan temuan serupa di negara-negara demokrasi mapan, yang mengindikasikan bahwa dalam konteks Indonesia di mana infrastruktur digital belum merata dan literasi media digital masih dalam tahap berkembang kesenjangan akses media memiliki dampak yang lebih besar terhadap pembentukan kepercayaan politik. Hal ini sejalan dengan temuan Jayawinangun dan Nugroho (2025) yang menemukan bahwa media digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan pengetahuan politik pemilih muda di Indonesia, dan pengetahuan yang lebih baik berkontribusi pada kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi. Temuan ini memiliki implikasi penting yaitu, intervensi untuk meningkatkan kualitas akses media bukan sekadar ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kapasitas literasi digital berpotensi secara langsung meningkatkan kepercayaan politik masyarakat.

Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik

Kepercayaan politik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik ($\beta = 0,212$; $p < 0,001$), sehingga H₂ diterima. Yang penting untuk dicatat, nilai beta kepercayaan politik ($\beta = 0,212$) lebih besar dibandingkan pengaruh langsung kesenjangan akses media terhadap partisipasi ($\beta = 0,171$), mengindikasikan bahwa faktor psikologis berupa kepercayaan terhadap institusi politik memiliki daya dorong yang lebih kuat terhadap keterlibatan warga dibandingkan faktor struktural berupa ketersediaan akses media semata. Individu yang percaya bahwa sistem politik berfungsi dengan baik, bahwa suara mereka akan dihitung dan dihargai, dan bahwa institusi penyelenggara pemilu bersifat independen dan adil cenderung memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk berpartisipasi, baik

dengan cara memberikan suara, terlibat dalam kampanye, maupun mendiskusikan isu politik di ruang digital. Temuan ini konsisten dengan *Political Trust Theory* dan dikonfirmasi oleh Ariel (2024) yang menemukan bahwa kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan lebih kuat memengaruhi partisipasi luring, sementara kepercayaan terhadap aktor politik spesifik lebih berpengaruh pada partisipasi daring. Quaranta (2022) juga menunjukkan bahwa di negara-negara yang mengalami erosi kepercayaan politik, penurunan partisipasi pemilu merupakan respons rasional warga terhadap sistem yang dianggap tidak responsif.

Dalam konteks Bogor pasca Pilkada 2024, merosotnya partisipasi pemilih dari 75% di Kota Bogor pada 2020 menjadi 63% pada 2024, dan dari kisaran 70% menjadi 54,55% di Kabupaten Bogor tidak dapat dilepaskan dari krisis kepercayaan yang berkembang di masyarakat terhadap kandidat dan proses elektoral (Anggraeni et al., 2025; Saputra, 2024). Fenomena golput yang melebihi suara pemenang di Kabupaten Bogor mencerminkan bukan sekadar apatisme pasif, melainkan ketidakpercayaan aktif terhadap kapasitas proses pemilu untuk menghasilkan perubahan yang bermakna (Akbar, 2023; Guseva, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan partisipasi politik tidak cukup hanya berfokus pada perluasan akses informasi tanpa membangun atau memulihkan kepercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi, peningkatan akses media saja tidak akan secara otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna.

Pengaruh Langsung Kesenjangan Akses Media terhadap Partisipasi Politik

Kesenjangan akses media terbukti berpengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap partisipasi politik ($\beta = 0,171$; $p = 0,001$), sehingga H_3 diterima. Meskipun nilai beta moderat ($0,171$), pengaruh langsung ini tetap bermakna secara statistik dan substantif: ia menunjukkan bahwa akses media bekerja secara independen terhadap partisipasi melalui jalur informasional, bahkan setelah pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan politik diperhitungkan. Akses media yang lebih luas dan berkualitas memungkinkan individu memperoleh informasi tentang kandidat, program, tata cara pemungutan suara, dan berbagai isu yang relevan dengan kepentingan mereka yang secara langsung menurunkan *transaction cost* partisipasi (biaya kognitif untuk memahami pilihan) dan meningkatkan *political knowledge* yang diperlukan untuk berpartisipasi secara rasional (Schäfer & Schemer, 2024). Perspektif komunikasi politik digital memandang media bukan sekadar saluran informasi satu arah, melainkan sebagai arena interaksi dan mobilisasi yang memfasilitasi terbentuknya jaringan sosial politik (Vaccari & Valeriani, 2018; Widodo & Kristiyono, 2025).

Namun temuan ini juga mengandung nuansa penting: pengaruh langsung yang moderat ($\beta = 0,171 < \beta$ kepercayaan $0,212$) mengonfirmasi bahwa akses media lebih berfungsi sebagai *enabler* daripada motivator partisipasi. Media menyediakan prasyarat informasional, tetapi tidak secara otomatis menciptakan kehendak untuk berpartisipasi.

Kurniawan (2024) dalam meta-analisisnya menemukan bahwa media sosial cenderung memperkuat kecenderungan partisipasi yang sudah ada bukan mentransformasikan apatisme menjadi keterlibatan. Ini menjelaskan mengapa meskipun penetrasi media sosial di Bogor tinggi, partisipasi Pilkada 2024 justru menurun warga yang sudah berminat berpartisipasi semakin terbantu oleh media digital, sementara yang tidak berminat tidak serta-merta termotivasi oleh tersedianya informasi. Pola ini menegaskan bahwa intervensi peningkatan partisipasi berbasis media harus disertai dengan strategi yang menyasar dimensi kepercayaan dan efikasi politik, tidak cukup hanya memperluas infrastruktur informasi.

Peran Mediasi Kepercayaan Politik

Uji mediasi menggunakan PROCESS Hayes Model 4 menunjukkan bahwa kepercayaan politik berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik. Efek tidak langsung sebesar 0,0602 terkonfirmasi signifikan karena interval kepercayaan *bootstrap* 95% tidak melewati nol [$LLCI = 0,0244$; $ULCI = 0,1036$], sehingga H_4 diterima. Mediasi bersifat parsial bukan penuh karena pengaruh langsung kesenjangan akses media terhadap partisipasi politik (jalur c') tetap signifikan ($\beta = 0,1247$; $p < 0,05$) setelah variabel mediator kepercayaan politik dimasukkan ke dalam model.

Mediasi parsial ini memiliki makna teoritis yang penting: ia menunjukkan bahwa terdapat dua jalur kausal yang bekerja secara simultan. Jalur pertama adalah jalur informatif-langsung (c'): akses media yang lebih baik menyediakan pengetahuan dan ruang partisipasi yang secara langsung mendorong keterlibatan, terlepas dari tingkat kepercayaan. Jalur kedua adalah jalur psikologis-tidak langsung ($a \times b$): akses media yang lebih baik membentuk kepercayaan politik yang lebih kuat, yang kemudian mendorong partisipasi. Efek tidak langsung sebesar 0,0602 menjelaskan bahwa sekitar 26% dari total pengaruh kesenjangan akses media terhadap partisipasi (total *effect* = $0,0602 + 0,1247 \approx 0,185$) bekerja melalui mekanisme pembentukan kepercayaan, sementara 74% sisanya bekerja secara langsung melalui jalur informasional.

Temuan mediasi parsial ini sejalan dengan kerangka yang dikembangkan oleh Zetra (2022) yang menemukan bahwa kesadaran politik memediasi secara parsial bukan penuh hubungan antara pengetahuan dan partisipasi, mengonfirmasi bahwa variabel psikologis berfungsi sebagai katalis, bukan pengganti, pengaruh informasional. Michalski et al. (2023) lebih jauh menunjukkan bahwa persepsi atas pengaruh politik terhadap diri sendiri (*political self-relevance*) berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan ini menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural (akses media), psikologis (kepercayaan, efikasi), dan situasional (konteks pemilu). Adanya efek langsung yang tetap signifikan juga mengindikasikan bahwa masih ada jalur-jalur kausal lain yang belum dimasukkan ke dalam model, kemungkinan melibatkan variabel seperti literasi media digital, jaringan sosial politik, identitas partai, dan norma sosial komunitas yang membuka peluang bagi penelitian

lanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kesenjangan akses media dan kepercayaan politik dalam membentuk partisipasi politik masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor pasca Pilkada 2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap 404 responden menggunakan regresi linear dan uji mediasi, penelitian ini menghasilkan empat temuan pokok.

Pertama, berkaitan dengan pengukuran tingkat ketiga variabel, ditemukan bahwa kesenjangan akses media berada pada kategori moderat (Mean = 40,34; SD = 10,98) dengan variasi yang cukup tinggi, mengindikasikan ketimpangan akses yang masih nyata di antara warga Bogor. Kepercayaan politik berada pada kategori sedang (Mean = 39,00; SD = 8,64), mencerminkan sikap ambivalen masyarakat terhadap institusi demokrasi. Partisipasi politik berada pada level yang relatif rendah (Mean = 12,89; SD = 8,02), dengan partisipasi daring (Mean = 6,11) lebih tinggi dibandingkan luring (Mean = 3,71) mempertegas paradoks antara tingginya konsumsi informasi digital dan rendahnya keterlibatan aktual dalam Pilkada 2024.

Kedua, berkaitan dengan pengaruh kesenjangan akses media terhadap kepercayaan politik, ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan ($\beta = 0,389$; $p < 0,001$). Semakin baik kualitas dan keluasan akses media individu, semakin tinggi kepercayaan politiknya. Temuan ini memperkuat *Knowledge Gap Hypothesis* bahwa ketimpangan akses informasi menghasilkan ketimpangan pengetahuan dan evaluasi politik (Haugsgjerd et al., 2021).

Ketiga, berkaitan dengan pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik, ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan ($\beta = 0,212$; $p < 0,001$), dengan kekuatan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh langsung kesenjangan akses media. Kepercayaan terhadap institusi dan proses politik merupakan prediktor yang lebih kuat dalam mendorong keterlibatan warga, baik secara daring maupun luring, sebagaimana diprediksi *Political Trust Theory* (Ariel et al., 2024; Quaranta et al., 2022).

Keempat, berkaitan dengan peran mediasi kepercayaan politik, uji mediasi mengonfirmasi kepercayaan politik berfungsi sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kesenjangan akses media dan partisipasi politik (*indirect effect* = 0,0602; Boot CI 95% [0,0244; 0,1036]). Mediasi bersifat parsial karena pengaruh langsung kesenjangan akses media terhadap partisipasi tetap signifikan setelah mediator dimasukkan. Kesenjangan akses media memengaruhi partisipasi melalui dua mekanisme: secara langsung melalui penyediaan informasi dan ruang partisipasi digital, dan secara tidak langsung melalui pembentukan kepercayaan politik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan tiga kerangka teori *Knowledge Gap Hypothesis*, *Political Trust Theory*, dan *Political Efficacy Theory* dalam satu model mediasi empiris yang diuji secara simultan dalam konteks Pilkada lokal Indonesia.

Kontribusi ini penting karena selama ini ketiga teori tersebut cenderung diaplikasikan secara terpisah dalam literatur komunikasi politik. Dengan membuktikan bahwa kesenjangan akses media memengaruhi partisipasi melalui dua jalur sekaligus langsung via penyediaan informasi, dan tidak langsung via pembentukan kepercayaan politik penelitian ini memperluas pemahaman tentang mekanisme komunikasi politik digital di negara berkembang yang karakteristik lanskap medianya berbeda dari negara-negara demokrasi terkonsolidasi yang selama ini mendominasi literatur. *Novelty* penelitian ini juga terletak pada penerapan uji mediasi dengan *bootstrapping* 4.000 *resamples* dalam konteks pemilu lokal Indonesia, yang memberikan estimasi efek tidak langsung yang lebih akurat dan bebas asumsi normalitas dibandingkan metode tradisional (Hayes, 2024).

Secara praktis, terdapat tiga implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari temuan ini. Pertama, pemerataan akses media khususnya infrastruktur internet yang stabil dan terjangkau di wilayah pinggiran Kabupaten Bogor perlu diprioritaskan, mengingat nilai rata-rata kesenjangan akses media yang masih moderat dengan variasi tinggi mengindikasikan bahwa ketimpangan akses masih nyata. Kedua, penguatan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dan proses demokrasi perlu dilakukan melalui komunikasi politik yang transparan, responsif, dan akuntabel temuan bahwa kepercayaan politik memiliki pengaruh lebih kuat terhadap partisipasi dibandingkan akses media menempatkan dimensi kepercayaan sebagai prioritas intervensi. Ketiga, program literasi media digital berbasis komunitas yang tidak hanya mengajarkan cara mengakses informasi, tetapi juga cara memverifikasi, memproses, dan mengevaluasi informasi politik secara kritis, perlu diperkuat agar peningkatan akses media dapat diterjemahkan menjadi partisipasi demokratis yang bermakna. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel moderator seperti literasi media digital, identitas partai, dan norma sosial komunitas, serta memperluas cakupan wilayah ke kabupaten atau kota lain di Indonesia untuk menguji generalisasi model mediasi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Roni Jayawinangun, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. Sardi Duryatmo, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan konstruktif, serta pendampingan akademik selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, khususnya Program Studi Televisi, Radio, dan Media Baru, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan. Penulis juga mengapresiasi seluruh responden di Kota dan Kabupaten Bogor yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

REFERENSI

Abdullah, N. H., Zaki, T. S., & Ahmad, M. F. (2024). Shaping

- the Future: Social Media's Role in Youth Political Information and Engagement - A Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 14(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v14-i12/23955>
- Adnan, M., & Mona, N. (2024). Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial oleh Calon Presiden Indonesia 2024 1. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.1-20>
- Akbar, M. F. (2023). *Fenomena Golput Dalam Pilkada (Studi Terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Dalam Pilkada Depok 2020*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74671>
- Anggraeni, K. A. R., Jayawinangun, R., & Aminuddin, A. T. (2026). How Do Political Actors on Social Media Drive Public Interest and Participation? *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v7i1.1150>
- Anggraeni, K. A. R., Permatasari, O. D., Widjaya, M. F. P., Hawari, M. H., Yuandari, W., & Jayawinangun, R. (2025). From Connectivity to Commitment: How Political Information Sources Shape Voter Participation in Bogor City and Regency. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 6(4), 573–581.
- Ariel, Y., Elishar, V., Weimann-saks, D., & Elishar, V. (2024). Analysing political engagement in a multimedia, multi-elections environment: predictive factors in an unpredictable political reality. *The Journal of International Communication*, 30(2), 233–253. <https://doi.org/10.1080/13216597.2024.2340710>
- Arrazak, M. A., & Adnan, M. F. (2025). *The Influence of Social Media Usage and Political Trust on Young Voters Political Participation in Padang City*. 1, 1–11.
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: a meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, Vol. 18 No. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>.
- Boulianne, S., Oser, J., & Hoffmann, C. P. (2023). Powerless in the digital age? A systematic review and meta-analysis of political efficacy and digital media use. *New Media & Society*, 25(9), 2512–2536. <https://doi.org/10.1177/14614448231176519>
- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). *Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age In the current era, digital is inevitable in everyday life. The information spread online makes digital literacy an essential skill to obtain and utilize information properly*. 8(148), 640–661. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p640-661>
- Elishar, M. V., Ariel, Y., & Weimann, G. (2020). Rethinking political communication in the digital sphere. *The Journal of International Communication*, 26(2), 190. <https://doi.org/10.1080/13216597.2020.1771397>
- Guseva, P. D. (2024). Demonstrations as a Form of Non-Institutionalised Political Participation: The Relationship with Institutional Trust and Political Regime Risks. *European Social Survey*, 30(4), 54–78.
- Halder, D. P., & Campbell-Phillips, S. (2020). A Review on Political Participation. *Asian Journal of Education and Social Studies*, March, 1–15. <https://doi.org/10.9734/ajess/2020/v7i230191>
- Handayani, H. (2024). Analisis Sentimen Pengguna X Terhadap Layanan Provider Iconnet Menggunakan Naï'Ve Bayes Dan Support Vector Machine. *Skripsi*, 12(112), 33–38. <http://ci.nii.ac.jp/naid/110002935335/>
- Hassan, M. H., Mahbob, M. Z., Nurshahidah, S., & Allam, S. (2022). *Media Literacy and Young People's Integrity in Political Participation: A Structural Equation Modelling Approach*. January 2023. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-20>
- Haugsgjerd, A., Hesstvedt, S., & Karlsen, R. (2021). Increased Media Choice and Political Knowledge Gaps: A Comparative Increased Media Choice and Political Knowledge Gaps: A Comparative Longitudinal Study of 18 Established Democracies 1995–2015. *Political Communication*, 00(00), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1868633>
- Hayes, A. F. (2024). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach Methodology in the Social Sciences*. Guilford Publications.
- Heryanto, G. G. (2024). *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia*. IRCiSoD.
- Jayawinangun, R., & Nugroho, D. R. (2025). Pengaruh Media Digital, Kesadaran, Dan Pegetahuan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 29(1), 16–28. <https://doi.org/10.56873/jskm.2025.5885>
- Jayawinangun, R., & Valdiani, D. (2020). Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-Laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi Politik. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.31-39>
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social Media's Influence on Political Participation: Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis in Indonesian Psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 236. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- Liu, J. H., Zhang, R. J., Vilar, R., Milojev, P., Hakim, M. A., de Zúñiga, H. G., Schumann, S., & Páez, D. (2021). A typology of masspersonal information seeking repertoires (MISR): Global implications for political participation and subjective well-being. *New Media and Society*, 23(9), 2729–2753. <https://doi.org/10.1177/1461444820932556>
- Michalski, P., Marchlewska, M., Szczepańska, D., Rogoza, M., & Molenda, Z. (2023). When politics affects the self: High political influence perception predicts civic and political participation. *Journal of Social and Political*

- Psychology*, 11(2), 516–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.5964/jssp.8379>
- Oser, J., Grinson, A., Boulianne, S., & Halperin, E. (2022). How Political Efficacy Relates to Online and Offline Political Participation: A Multilevel Meta-analysis. *Political Communication*, 39(5), 607–633. <https://doi.org/10.1080/10584609.2022.2086329>
- Quaranta, M., Cancela, J., Martín, I., & Tsirbas, Y. (2022). Trust, satisfaction and political engagement during economic crisis: Young citizens in Southern Europe. *Age-related Aspects of Political Transformation in Post-crisis Southern Europe*, 20–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003323143-2>
- Ramadhani, S. P., Kurniawati, N. D., Nurcahyani, A., Khasanah, N., & Syaharani, N. V. (2025). *Journal of Indonesian Social Studies Education Media Sosial: Pemantik Partisipasi Politik Generasi Z Menuju Pilkada Jakarta Yang Bermakna*. 3(1), 54–62.
- Rapeli, L. (2025). *The Impact of Increased Learning Opportunities on Political Knowledge: Evidence From Repeated Cross-Sectional Surveys in Finland in 2008 and 2020*. May.
- Reza, M., Duryatmo, S., & Suandi, A. (2024). *Adaptasi Penggunaan Teknologi Media Sosial dan Media Televisi dalam Mengakses Informasi pada Generasi X di Desa Tapos Depok*. 5(9), 3393–3406.
- Saputra, A. S. (2024, Desember 29). KPU Kabupaten Bogor Serahkan Hasil Pemilu ke Jabar. [rri.co.id. https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1221784/kpu-kabupaten-bogor-serahkan-hasil-pemilu-ke-jabar](https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1221784/kpu-kabupaten-bogor-serahkan-hasil-pemilu-ke-jabar)
- Schäfer, S., & Schemer, C. (2024). *Informed participation? An investigation of the relationship between exposure to different news channels and participation mediated through actual and perceived knowledge*. January, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1251379>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Subhaktiyasa, P. G. (2021). *Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka*. 5(4), 5599–5609.
- Sugianto, T., & Jayawinangun, R. (2026). *The Role of Informal Channels in Shaping Local Political Communication: Insights from Bogor, Indonesia*. 7(1), 126–133.
- Sugiyono. (2021). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (Ed.)). ALFABETA.
- Tempo. (2024). *Meleset dari Target, Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Bogor Hanya 63 Persen*. Tempo.co.
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2018). *Digital political talk and political participation: Comparing established and third wave democracies*. 8(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.1177/2158244018784986>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 1–26. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Widodo, S., & Kristiyono, J. (2025). *Digital democracy: transforming political communication in Indonesia*. Select Citation Style. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9524>
- Willeck, C., & Mendelberg, T. (2022). *Education and Political Participation*. 89–110.
- Zetra, A., Khalid, K. A. T., Yanuar, F., & Marisa, S. (2022). Political Awareness, Knowledge, And Participation Relationship Using Structural Equation Modeling Approach. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1).

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. Copyright © Olivia Devita Permatasari, Roni Jayawinangun, and Sardi Duryatmo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.